



GOVERNMENT PERFORMANCE PADA KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION CAPABILITY MEMPENGARUHINYA? (STUDI EMPIRIS DI PROVINSI MALUKU UTARA)

Heru Sulistiyo¹, Aleknaek Martua^{2*}, Sayuti³, Mulyana⁴, Irka Tia Ginting⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Jl. Raya Bandung - Sumedang Km.20, Jawa Barat, 45363, Indonesia

*penulis koresponden

email: aleknaek@ipdn.ac.id

Abstract

Effective governance is now one of the key pillars in maintaining the stability and prosperity of a country. The development of information and communication technologies has fundamentally changed the way governments operate around the world. The digital age has opened up new opportunities and presented significant challenges in managing the country and serving the community. In 2021, North Maluku Province has officially established the Regional Digitalization Acceleration and Expansion Team (TP2DD). The program is expected to be a good start and a momentum to establish coordination, commitment, and synergy together in the context of expanding the digitization of local government transactions, to support national economic recovery which has a real impact on people's welfare. This study builds and empirically tests a model of the impact of government digital transformation on performance based on dynamic capability theory. This research uses a quantitative method approach. The research design used is a survey. The analysis method used is using a confirmatory factor analysis approach, namely Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). From the results of empirical statistical testing on case studies in North Maluku Province in the implementation of digitalization in each regional apparatus, transformation capability directly affects government performance. Transformation capability directly affects partnering agility, although at the same time the research shows that partnering agility has not had a significant effect on government performance. So related to partnering agility, it is necessary to create a joint program holistically in order to increase partnering agility. The results of this study also provide ideas for further research to find out and analyze what factors can influence partnering agility to be achieved.

Keywords: *Government Performance, Partnering Agility, Transformation Capability, and Digital Transformation*

Abstrak

Pemerintahan yang efektif saat ini merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara pemerintahan beroperasi di seluruh dunia. Era digital telah membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan yang signifikan dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Pada tahun 2021, Provinsi Maluku Utara telah resmi dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Program tersebut diharapkan dapat menjadi permulaan yang baik serta menjadi momentum untuk menjalin koordinasi, komitmen, serta sinergi bersama dalam rangka perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membangun dan menguji secara empiris model dampak transformasi digital pemerintah terhadap kinerja berdasarkan teori kapabilitas dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan survey. Metode analisis yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori yaitu Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Dari hasil pengujian statistik secara empiris pada studi kasus di Prov. Maluku Utara dalam pelaksanaan digitalisasi di setiap perangkat daerah, secara langsung

transformation capability memengaruhi government performance. Transformation capability secara langsung memengaruhi partnering agility, walau pada saat yang sama dalam penelitian ditunjukkan bahwa partnering agility belum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap government performance. Sehingga terkait dengan partnering agility, perlu untuk dibuat suatu program bersama secara holistik agar dapat meningkatkan partnering agility. Hasil dari penelitian ini pun memberikan gagasan untuk penelitian selanjutnya untuk mencari tau dan menganalisis mengenai faktor apa saja yang dapat memengaruhi partnering agility itu tercapai.

Kata Kunci: *Government Performance, Partnering Agility, Transformation Capability, and Digital Transformation*

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang efektif saat ini merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Efektivitas pemerintahan mencerminkan sejauh mana sebuah pemerintahan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara besar, tetapi juga penting dalam skala lokal dan regional. Efektivitas pemerintahan berperan dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkelanjutan (Wu & Tham, 2023). Pentingnya efektivitas pemerintahan mencuat terutama dalam konteks global yang semakin kompleks dan dinamis. Pemerintahan yang efektif memiliki dampak yang positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan masalah-masalah sosial, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai efektivitas pemerintahan, perlu ada koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintahan,

keterlibatan masyarakat sipil, dan partisipasi aktif warga negara. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif (Filindra et al., 2022; Handayani et al., 2021). Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bijak serta pengelolaan sumber daya yang efisien juga merupakan komponen kunci dalam mencapai tujuan efektivitas pemerintahan (Musabayana et al., 2022). Sehingga pada akhirnya, efektivitas pemerintahan bukan hanya tentang seberapa besar kekuasaan sebuah pemerintahan, tetapi lebih kepada bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kebaikan masyarakat dan menjaga keadilan sosial. Dalam era globalisasi ini, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintahan semakin kompleks, sehingga penting untuk terus mengembangkan strategi dan metode yang dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan agar dapat merespons perubahan yang cepat dalam dunia saat ini (Shinohara, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara pemerintahan beroperasi di seluruh dunia. Era digital telah membuka peluang

baru dan menghadirkan tantangan yang signifikan dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, digitalisasi memegang peran yang semakin penting dalam transformasi pemerintahan modern. Pengenalan teknologi digital telah mengubah lanskap pemerintahan dari yang sebelumnya didasarkan pada proses manual menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif. Selain digitalisasi dalam pemerintahan, transformasi merupakan elemen kunci dalam perkembangan pemerintahan modern di era yang penuh tantangan ini. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, kemampuan pemerintah untuk bertransformasi menjadi faktor penting dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Mart et al., 2022). Konsep "transformation capability" atau kemampuan transformasi dalam pemerintahan menjadi semakin relevan, karena pemerintah perlu memiliki daya adaptasi dan kemampuan untuk mengubah diri demi mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik dan lebih modern. Pemerintahan yang memiliki transformation capability tidak hanya dapat mengatasi perubahan, tetapi juga mampu memimpin dan membentuk perubahan itu sendiri. Dengan memahami pentingnya transformation capability dalam pemerintahan, kita dapat lebih baik menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang di era modern ini dan bergerak

menuju pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif, dan efektif dalam melayani kepentingan warga negara.

Berkaca pada negara yang ada di Eropa dalam menerapkan digitalisasi dan fokus pada transformation capability. Salah satu contoh kesuksesan transformation capability dalam pemerintahan adalah transformasi pemerintah Estonia. Estonia, sebuah negara kecil di Eropa Utara, telah berhasil melakukan perubahan besar dalam sistem pemerintahannya yang disebut sebagai "e-Estonia". Pada pelaksanaan E-Government, Estonia telah mengembangkan sistem e-Government yang memungkinkan warganya untuk melakukan sebagian besar layanan pemerintah secara online. Ini termasuk pemilihan umum online, pembayaran pajak, registrasi bisnis, dan bahkan resep medis elektronik. Transformasi ini mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pemerintahan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu Estonia telah menciptakan program e-Residency yang unik, yang memungkinkan warga negara asing untuk menjadi "warga negara digital" Estonia. Ini memberikan akses ke layanan perbankan dan bisnis di Uni Eropa tanpa harus tinggal di negara tersebut secara fisik. Inisiatif ini telah menciptakan peluang bisnis dan investasi baru. Di samping itu, Estonia telah berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman siber. Setelah serangan siber besar-besaran

pada tahun 2007, negara ini memperkuat pertahanan siber dan mengembangkan arsitektur keamanan digital yang kuat, termasuk cadangan data di luar negeri. Hal ini menjadikan Estonia sebagai salah satu negara yang paling aman dalam hal keamanan siber. Di dalam inovasi dan teknologi, pemerintah Estonia terus mendorong inovasi di sektor teknologi. Mereka telah mendukung perkembangan perusahaan teknologi lokal seperti Skype, yang kemudian menjadi perusahaan global. Ini menciptakan lapangan pekerjaan dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Dalam hal partisipasi publik, pemerintah Estonia aktif melibatkan warganya dalam proses pembuatan kebijakan melalui platform online seperti Rahvaalgatus, yang memungkinkan warga untuk mengajukan inisiatif legislatif. Keberhasilan Estonia dalam transformasi pemerintahan ini adalah contoh nyata dari kemampuan transformasi yang kuat dalam tindakan. Negara ini telah berhasil mengubah cara pemerintahannya beroperasi, meningkatkan layanan kepada warganya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kesuksesan ini telah memotivasi negara-negara lain untuk mengeksplorasi model serupa dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan mereka di era digital. Hal lainnya pada kondisi pandemic Covid-19 telah mendorong pemerintahan

memerlukan inovasi dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi (Elsye, 2021).

Saat ini dengan perkembangan mendalam dari Revolusi Industri Keempat, masyarakat manusia semakin berada dalam jaringan digital di mana segala sesuatu saling terhubung. Perkembangan pesat teknologi digital seperti komputasi awan, internet of things, blockchain, kecerdasan buatan, dan 5G telah memberikan dampak yang luas pada politik, ekonomi, dan masyarakat. Berbagai transformasi seperti fungsi pemerintah dan mode perilaku juga menunjukkan keadaan pertumbuhan eksponensial. Untuk beradaptasi dengan perkembangan dan untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan pelayanan pemerintah, pemerintah daerah pemerintah juga telah memulai proses transformasi digital. Dalam konsep konkretnya, transformasi digital berarti bahwa, dengan dukungan teknologi digital, struktur organisasi, proses struktur organisasi, proses administrasi, dan metode pemberian layanan publik metode pemberian layanan publik telah berubah, dan tata kelola mode dan kinerja fungsi pemerintahan telah telah berinovasi. Saat ini, pengembangan transformasi digital telah telah dilihat oleh pemerintah di seluruh dunia sebagai kebutuhan strategis strategis untuk meningkatkan kinerja layanan, meningkatkan pengalaman pelanggan pengalaman pelanggan, merampingkan operasi dan menciptakan bisnis baru model bisnis baru.

Eksplorasi aktif transformasi digital oleh pemerintah daerah tidak hanya kondusif bagi peningkatan kemampuan tata kelola pemerintah pemerintah sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi fungsi-fungsi pemerintah yang bertransformasi memenuhi tuntutan publik untuk membangun pemerintahan yang berorientasi pada layanan.

Di era di mana teknologi informasi merajalela, pemerintahan harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Digitalisasi telah menjadi kunci dalam perubahan tata kelola pemerintahan, membawa dampak yang mendalam dalam berbagai aspek. Pendahuluan ini akan membahas mengapa digitalisasi dalam pemerintahan menjadi sangat penting, serta bagaimana peran teknologi ini telah mengubah lanskap administrasi publik. Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, memperbaiki transparansi, dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Transformasi digital ini membantu pemerintah menjawab tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, mobilitas penduduk, dan lainnya. Pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan juga tercermin dalam peningkatan kualitas layanan publik (Zhang & Ayele, 2022).

Warga negara kini dapat mengakses berbagai layanan, seperti perizinan, pembayaran pajak, pendaftaran kelahiran, dan banyak lagi, secara online dengan cepat dan mudah. Ini bukan hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mengurangi birokrasi, menghindari kemungkinan korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih baik, yang dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan informasional. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, pemerintah dapat mengidentifikasi tren, mengukur dampak kebijakan, dan merancang solusi yang lebih efektif untuk masalah-masalah kompleks. Dalam konteks dinamika lingkungan internasional yang kompleks dan kebutuhan masyarakat domestik yang semakin beragam, bagaimana meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan menjadi isu utama yang menjadi perhatian di kalangan akademisi. Dalam kondisi yang ideal, transformasi digital akan membawa perubahan pada kinerja pemerintah. Saat ini, sebagian besar studi tentang transformasi digital pemerintahan berfokus pada isu-isu seperti: Faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan realisasi transformasi digital, dampak transformasi digital, praktik-praktik lokal, masalah dan kesulitan yang dialami serta inspirasi. Namun, studi empiris yang secara khusus menunjukkan pengaruh dan

mekanisme transformasi digital terhadap kinerja pemerintah masih belum memadai.

Pemerintah daerah saat ini sebagai pelaksana dari pelaksanaan pemerintahan di daerah, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai bentuk desentralisasi agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di daerah (Wulandari & Widowati, 2023). Sebagaimana Provinsi Maluku Utara, sebagai salah satu provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia, memiliki potensi dan tantangan yang unik dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital. Pada tahun 2021, Provinsi Maluku Utara telah resmi dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Menurut Sekda Prov. Maluku Utara, terbentuknya TP2DD tersebut diharapkan dapat menjadi permulaan yang baik serta menjadi momentum untuk menjalin koordinasi, komitmen, serta sinergi bersama dalam rangka perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian koordinasi antar lembaga atau instansi yang tergabung didalamnya, dapat maksimal dan implementasi program mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana efektifitas dari variabel *transformation agility* dalam mempengaruhi efektivitas

pemerintahan di Prov. Maluku Utara. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana variabel *transformation agility* tersebut dapat mempengaruhi baik itu secara langsung maupun tak langsung di Prov. Maluku Utara. Hal ini penting mengingat bahwa Prov. Maluku Utara merupakan provinsi yang cukup berhasil dalam menerapkan sistem pemerintahan. Pada tahun 2022, Prov. Maluku Utara salah satunya telah berhasil dalam meraih penghargaan dan anugerah meritokrasi pemerintahan. Presetasi tersebut tidak terlepas dari transformasi digital yang diterapkan dalam suatu roda pemerintahan.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mekanisme dampak transformasi digital terhadap kinerja pemerintah di Prov. Maluku Utara. Teknologi digital memberikan lebih banyak kemungkinan untuk kerja sama antara berbagai lembaga, tetapi juga memberikan persyaratan yang lebih tinggi pada kemampuan dalam berkoordinasi khususnya perangkat daerah yang ada di Prov. Maluku Utara. Oleh karena itu, muncul pertanyaan lanjutan dalam penelitian mengenai apa peran dari kemampuan bermitra dalam kolaborasi antar lembaga dan perangkat daerah dalam proses transformasi digital yang dalam proses transformasi digital mendorong kinerja pemerintah. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini membangun dan menguji secara empiris model dampak transformasi digital

pemerintah terhadap kinerja berdasarkan teori kapabilitas dinamis. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan informasi yang berharga tentang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dan kualitas pemerintah, tetapi juga memberikan saran-saran untuk pemerintahan khususnya di Prov. Maluku Utara yang sedang mengalami transformasi digital saat ini.

LANDASAN TEORI

Kinerja pemerintahan dalam konteks penelitian ini merupakan suatu variabel yang menjadi tujuan atau output utama dan digunakan sebagai variabel sebab dalam penelitian ini. Ada beberapa indikator dalam kinerja pemerintahan yang diterapkan dalam penelitian sebagai refleksi variabel tersebut. Indikator tersebut diantaranya adalah peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan proses administrasi, dan peningkatan literasi digital. Kinerja pemerintahan yang terefleksikan dalam indikator-indikator tersebut difokuskan untuk transformasi digital yang berjalan di dalam roda pemerintahan saat ini.

Pada lingkungan khususnya pemerintahan yang cukup dinamis dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat, mempertahankan suatu upaya daya saing dan meningkatkan kinerja organisasi telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Responsibilitas dan ketangguhan cepat suatu

organisasi terhadap penggabungan dan alokasi sumber daya internal dan eksternal sangatlah dirasakan penting. Dalam hal ini teori kapabilitas dinamis akan memberikan dasar teoritis penting untuk proses ini. Kapasitas dinamis merupakan suatu gagasan yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan internal organisasi untuk dapat melakukan integrasi, pengembangan, dan konfigurasi kembali suatu sumber daya baik itu internal dan eksternal dalam menghadapi dan mengatasi suatu lingkungan yang dinamis (Makhloufi & Rosak-szyrocka, 2023). Kapabilitas dinamis merupakan suatu praktik keutuhan organisasi dan praktik aksi strategis yang dapat memberi dan mewujudkan suatu alokasi sumber daya yang baru dalam menghadapi dan mengatasi suatu perubahan organisasi. Kapabilitas dinamis merupakan juga suatu kemampuan organisasi yang secara sengaja untuk melakukan suatu perubahan, menciptakan sesuatu yang baru, memperluas potensi atau memodifikasi hal yang sudah ada dengan basis sumber dayanya (Xiao et al., 2023).

Pada dasarnya terdapat tiga dimensi dari kapabilitas dinamis. Dimensi pertama adalah persepsi atau penginderaan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu peluang dan risiko lingkungan dalam organisasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengamati sesuatu hal yang terjadi di sekitar. Selanjutnya adalah mengadopsi atau merebut dengan berfokus pada organisasi

dalam melakukan optimalisasi dan mobilisasi sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memanfaatkan peluang strategis. Terakhir adalah dimensi transformasi yang menunjukkan bagaimana suatu organisasi khususnya dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah dapat merealokasi sumber dayanya untuk dapat mempertahankan pembaruan yang berkelanjutan untuk organisasi.

Secara umum diyakini bahwa kapabilitas dinamis adalah sebuah merupakan perluasan dari pandangan berbasis sumber daya yang berpendapat bahwa organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya selama organisasi tersebut memiliki sumber daya langka yang tak tergantikan. Namun, pandangan ini tidak menjelaskan bagaimana organisasi merespons perubahan keadaan. Kemampuan dinamis ditekankan dengan menyesuaikan basis sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang bersifat dinamis, mencapai keseimbangan optimal yang dinamis antara organisasi dan lingkungan (Makhloufi & Rosak-szyrocka, 2023). Pada saat yang sama, adaptasi dinamis bermanfaat bagi organisasi untuk membentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam lingkungan dinamis yang kompleks. Hal tersebut lebih kondusif untuk pengembangan sebuah organisasi khususnya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kapabilitas dinamis berbeda dengan

kapabilitas umum karena kapabilitas ini bersifat strategis dan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Sejak diusulkan, kapabilitas dinamis telah menarik perhatian banyak peneliti. Saat ini, penelitian tentang kapabilitas dinamis terutama berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi (sumber daya organisasi), budaya organisasi, struktur organisasi, teknologi informasi, kognisi manajer, keterampilan karyawan, dan efek pengaruh (kinerja organisasi, pengembangan organisasi sebagai topik penelitian di bidang manajemen strategis.

Di bidang administrasi publik, penelitian tentang kapabilitas dinamis terutama tercermin dalam pengembangan e-government. Pertama, sektor publik, yang diwakili oleh pemerintah harus berhadapan dengan lingkungan yang berubah dengan cepat seperti halnya organisasi pada umumnya, sehingga kapabilitas dinamis juga sangat penting bagi sektor publik. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, e-government dan pembangunan pemerintahan dengan basis digital telah menjadi orientasi strategis pembangunan pemerintah. Kapabilitas dinamis juga berperan penting dalam penciptaan nilai publik. Misalnya, dalam pembentukan situs web portal pemerintah dan tim layanan Digital, dengan mengintegrasikan dan menyebarkan sumber daya, pemerintah memfasilitasi aliran data dan informasi, yang

tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintah, tetapi juga memenuhi beragam kebutuhan warga negara dan menciptakan nilai-nilai publik. Kapabilitas dinamis juga mempengaruhi efektivitas pemerintah yang didukung TI. Semakin dinamis pemerintah, semakin efisien efektivitas yang didukung TI.

Bagi pemerintah, transformasi digital sebenarnya telah sebenarnya dipandang sebagai reformasi administrasi (Gao & Tang, 2023). Pada teori yang mengacu pada Xiao et al (2023), manajemen akan didesain ulang dengan menggunakan teknologi informasi, yang akan membantu pemerintah memberikan layanan publik layanan publik secara lebih efektif sehingga akan meningkatkan nilai publik yang lebih besar. Dalam proses ini, transformasi digital telah mengubah struktur internal dan prosedur kerja pemerintah. Selain itu, transformasi digital telah membawa warga negara lebih dekat dengan pemerintah. Semakin banyak warga negara akan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini juga akan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan warga negara akan terpengaruh secara positif. Hal ini akan meningkatkan potensi kerja sama atau produksi bersama yang lebih produktif di antara mereka. Sehingga seluruh potensi kerja sama atau produksi bersama di antara mereka telah dieksplorasi.

Dapat dilihat saat ini bahwa integrasi dinamis dari sumber daya internal dan sumber daya eksternal merupakan hal yang penting dalam transformasi digital pada sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendesak untuk mempromosikan suatu integrasi sumber daya yang efektif, terutama kerja sama yang efisien dengan organisasi dan subjek eksternal lainnya. Penelitian saat ini telah menganalisis isu-isu tersebut dari perspektif kapabilitas dinamis dan kerja sama. Dalam artikel ini, model yang sistematis akan dibangun dan didemonstrasikan untuk menyediakan bahan referensi bagi contoh daerah di Prov. Maluku Utara dalam tahap transformasi digital.

Transformation Capability

Kemampuan transformasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk membuat perubahan strategis dan mewujudkan suatu transformasi. Kemampuan mengeksplorasi dan memanfaatkan dapat membantu menciptakan sesuatu yang baru dan menemukan peluang (Putritamara et al., 2023). Sementara itu, untuk mengimplementasikan strategi digital dalam penelitian yang digunakan dalam mengadopsi AI pada penelitian lainnya, suatu organisasi yang termasuk diimplementasikan dalam penelitian ini yakni pemerintahan juga membutuhkan kemampuan transformasi, untuk mewujudkan perubahan yang bersifat strategis (Phuoc, 2022).

Mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Xiao et al. pada tahun 2023, *transformation capability* mengharuskan organisasi untuk mengimplementasikan keputusan dan rencana organisasi dengan mendesain ulang model bisnis, menyelaraskan kembali sumber daya, dan meningkatkan praktik organisasi setelah merasakan dan memanfaatkan peluang, serta untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan kinerja organisasi dengan mengalokasikan kembali sumber daya internal dan eksternalnya. Menjadi organisasi yang transformasional berarti bahwa, sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk memandu dan mengimplementasikan proses bisnis yang baru sehingga perubahan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan efektif dalam pelaksanaannya. Transformasional pun memastikan bahwa suatu organisasi dapat merespons lingkungan yang berubah dengan cepat dengan mendukung organisasi untuk terus memperbarui sumber daya dan strukturnya secara strategis.

Pada konsep penelitian yang digunakan dalam Xiao et al pada tahun 2023, dimensi *dynamic capability* yang direfleksikan oleh dimensi *sensing capability*, *seizing capability*, dan *transformation capability* digunakan sebagai variabel eksogen dalam memengaruhi *partnering agility* sebagai variabel laten manifest, dan dapat memengaruhi variabel eksogen *government performance*. Pada penelitian ini hanya

digunakan satu dimensi *transformation capability* saja karena isu transformasi khususnya di Prov. Maluku Utara menjadi isu sentral yang perlu untuk dikaji. *Transformation capability* mencakup kegiatan mendesain ulang model bisnis, menyelaraskan kembali sumber daya organisasi dan memperbaiki praktik-praktik organisasi yang dapat membantu mewujudkan pembaharuan atau perubahan strategi organisasi. Memiliki *transformation capability* berarti organisasi mampu berinovasi terus menerus untuk mencapai proses transformasi digital yang berkelanjutan (Putritamara et al., 2023; Shin et al., 2023). *Transformation capability* berguna bagi organisasi untuk merespon lingkungan yang berubah dengan cepat dan merupakan faktor kunci bagi organisasi untuk mewujudkan transformasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif (Shin et al., 2023). Dalam proses transformasi digital pemerintah, proses administrasi yang ada, prosedur bisnis, struktur organisasi dan layanan publik akan secara komprehensif didesain ulang (Gao & Tang, 2023). Melalui studi empiris, menyesuaikan kembali sumber daya informasi data dari departemen pemerintah dan mempromosikan aliran informasi untuk mencapai interoperabilitas antar departemen merupakan hal yang penting untuk mengukur keberhasilan transformasi digital pemerintah transformasi digital pemerintah (Xiao et al., 2023). Hal ini

sangat membantu dalam langkah yang ampuh untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah. Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan hasil positif dari kemampuan transformasi digital dalam meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi melalui studi empiris. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis penelitian pertama adalah:

H1: Transformation capability berpengaruh positif terhadap government performance.

Partnering Agility

Pada konsep penelitian yang digunakan dalam Xiao et al pada tahun 2023, dimensi dynamic capability yang direfleksikan oleh dimensi *sensing capability*, *seizing capability*, dan *transformation capability* digunakan sebagai variabel eksogen dalam memengaruhi partnering agility sebagai variabel laten manifest, sehingga secara dapat memengaruhi variabel eksogen government performance. Namun dalam penelitian ini dimensi *partnering agility* hanya mendapatkan pengaruh dari *transformation capability* untuk mempengaruhi *government performance*. Dalam penelitian ini difokuskan variabel laten *transformation capability* digital pemerintah akan dikombinasikan dengan *partnering agility* sebagai variabel mediasi untuk secara khusus mempelajari peran mediasi dari partnering agility dalam dampak

dari kapabilitas dinamis pada kinerja pemerintah. *Partnering agility* berarti bahwa organisasi mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang inovasi dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber daya, aset, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan yang relevan, yang juga memfasilitasi organisasi untuk dengan cepat mengidentifikasi mitra yang sesuai atau memodifikasi kemitraan yang ada. *Partnering agility* menekankan interaksi antara organisasi dan mitranya. Organisasi dengan *partnering agility* yang unggul mendapatkan banyak manfaat dari merasakan dan memanfaatkan lebih banyak peluang dengan memanfaatkan sumber daya sumber daya mitra mereka. Model tata kelola produksi bersama memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih baik dan memenuhi harapan warga melalui urun daya.

Mengikutsertakan berbagai jenis pemangku kepentingan dalam proses transformasi digital, dalam bentuk pengembangan strategi digital bersama, kolaborasi dengan berbagai organisasi, pembiayaan bersama, dan penyediaan layanan dan data bersama, dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan menciptakan nilai publik. Dalam penelitian empiris menunjukkan bahwa *partnering agility* berkorelasi positif dengan kinerja organisasi, dan kerja sama dengan mitra akan meningkatkan nilai produk atau

layanan organisasi, sehingga meningkatkan kinerja organisasi (Xiao et al., 2023). Dapat dilihat bahwa dengan bekerja sama dengan organisasi lain dan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan sumber daya lainnya, pemerintah dapat memainkan peran ketangkasan bermitra untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, variabel variabel dalam penelitian ini akan menambahkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Transformation Capability berpengaruh positif terhadap Partnering Agility.

H3: Partnering Capability berpengaruh positif terhadap government performance

II. METODE

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan survey. Desain penelitian dengan survey lebih efektif dilakukan dalam lokus penelitian karena lokasi perangkat daerah yang cukup jauh dan tidak mudah dijangkau di Prov. Maluku Utara. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang diambil dengan metode penyebaran kuesioner kepada pejabat setiap perangkat daerah di Prov. Maluku Utara. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner online dilakukan dengan menyebarkan melalui daring dengan mengirimkan pesan kepada calon responden. Sampel yang digunakan

dalam penelitian ini sebanyak 30 pejabat dari seluruh perangkat daerah yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan disposisi mengenai penerapan digitalisasi pada perangkat daerah mereka.

Metode analisis yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori yaitu *Partial Least Squares – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). PLS-SEM digunakan untuk menghubungkan keterkaitan variabel laten yang tidak dapat diukur langsung antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Masing-masing variabel laten dijelaskan berdasarkan indikator-indikatornya. Dalam penelitian ini ada dua variabel laten yang bersifat eksogen yang digunakan untuk dilihat hubungannya terhadap satu variabel laten yang bersifat endogen. Variabel laten eksogen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah *transformation capability* dan *partnering agility* serta variabel laten endogen yang digunakan adalah *government performance*. Adapun beberapa variabel yang digunakan beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Konsep Variabel Penelitian dan Indikator

Variabel Laten	Indikator	Keterangan
<i>Government Performance</i>	y11	Transformasi digital dalam meningkatkan kepuasan Masyarakat
	y12	Transformasi digital dalam meningkatkan proses administrasi

	y13	Transformasi digital dalam meningkatkan literasi digital
<i>Partnering Agility</i>	x11	Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar departemen
	x12	Pemda perlu untuk melakukan inovasi
<i>Transformation Capability</i>	x21	Penggunaan teknologi digital oleh Pemda
	x22	Data sharing, kolaborasi, dan pengaturan ulang sumber daya

Sumber: Penulis (diolah)

Pada Tabel 1 tertuang bagaimana variabel laten direfleksikan melalui indikator-indikatornya. Dari masing-masing variabel laten, ditentukan indikator-indikator yang sesuai teori dapat merefleksikan variabel laten dalam penelitian tersebut. Variabel laten dan indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan konsep variabel yang digunakan dalam penelitian Xiao et al, namun dalam konsep penelitian ini ada modifikasi penelitian dengan memfokuskan penelitian pada *transformation capability* dalam memengaruhi *government performance*. Sehingga variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah *transformation capability*. Namun pada prosesnya *transformation capability* memberikan pengaruh tak langsung terhadap *government performance* melalui variabel laten *partnering agility*. Setelah ini alat analisis dalam pengujian digunakan PLS-SEM yang merupakan suatu model statistik persamaan

struktural SEM yang berbasis pada komponen atau varian. PLS-SEM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis pada kovarian menjadi berbasis varian. Keunggulan metode PLS-SEM diantaranya adalah dapat digunakan untuk sampel yang relatif kecil dan bebas dari asumsi. Dalam pemodelan yang dilakukan, berdasarkan penelitian pendukung ditentukan hipotesis bahwa *transformation capability* mempengaruhi secara langsung *government performance*. *Transformation capability* pun memengaruhi secara tak langsung *government performance* melalui *partnering agility*. Dari model yang dibuat, maka dapat diketahui bagaimana peran dari *transformation capability* berpengaruh terhadap *government performance* secara keseluruhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini dijelaskan pada bab ini. Analisis yang dilakukan diantaranya adalah analisis secara deskriptif yang kemudian dilakukan pengujian secara empiris menggunakan analisis PLS-SEM.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Sampel Perangkat Daerah dalam Penelitian

Perangkat Daerah	Kuantitas	Rasio
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	5	17%
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)	13	43%

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (DISKOMINFOSAN)	4	13%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	3	10%
Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)	2	7%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	3	10%
Grand Total	30	100%

Sumber: Penulis (diolah)

Dari Tabel 2 tersebut tertuang bahwa ada beberapa perangkat daerah yang telah disepakati menjadi pemangku kepentingan dari digitalisasi di pemda Prov. Maluku Utara. Sesuai dengan proporsinya, Balitbangda merupakan perangkat daerah yang mengetahui roadmap digitalisasi di Prov. Maluku Utara sehingga pengambilan sampel paling banyak diambil dari perangkat daerah tersebut. Dari sejumlah perangkat daerah yang ada di Prov. Maluku Utara, diambil enam perangkat daerah yang telah memulai dan memiliki peran dalam mengembangkan digitalisasi di Prov. Maluku Utara. Enam perangkat daerah yang memiliki peranan dalam mengembangkan digitalisasi diantaranya adalah Balitbangda, Bapenda, Diskominfo, Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dispora.

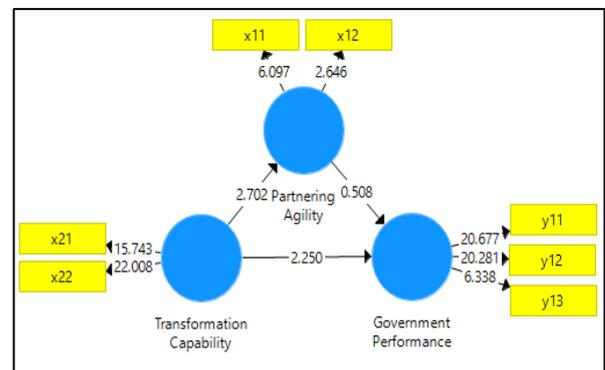
Tabel 3. Analisis Deskriptif Sampel Menurut Jabatan di Perangkat Daerah

Jabatan	Kuantitas	Rasio
Eselon 2	6	20%
Eselon 3	10	33%
Eselon 4	8	27%
Lainnya (Pejabat Teknis)	6	20%
Grand Total	30	100%

Sumber: Penulis (diolah)

Dari sejumlah perangkat daerah yang telah dijadikan sampel, berikut pada Tabel 3

tertuang jabatan dari masing-masing sampel dalam pelaksanaan digitalisasi di Prov. Maluku Utara. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan suatu jabatan yang memiliki fungsi koordinasi dan mengetahui fungsi teknis dalam pelaksanaan digitalisasi di Prov. Maluku Utara. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, dan Jabatan Lainnya yang mengetahui hal bersifat keteknisan dalam pelaksanaan digitalisasi.



Gambar 1. Model Pengaruh Transformation Capability terhadap Government Performance
Sumber: Penulis (diolah)

Dari Gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa transformation capability memengaruhi government performance secara positif baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat diuji lanjutan apakah pengaruh tersebut dapat dibuktikan secara empiris.

Tabel 3. Outer Loading Indikator pada Variabel

Variabel Laten	Indikator	Outer Loading
Partnering Agility	x11	0.911
	x12	0.686
Transformation	x21	0.904

Capability	x22	0.899
Government Performance	y11	0.911
	y12	0.944
	y13	0.826

Sumber: Penulis (diolah)

Dari Tabel 3 tersebut merupakan pengujian convergen validity yang menjelaskan pengujian validitas dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian. Dari hasil yang didapatkan, menunjukkan nilai dari outer loading bernilai di atas 0,6 yang berarti bahwa indikator dari masing-masing variabel laten dikatakan memenuhi asumsi validitas variabel.

Tabel 4. Average Variance Extract Variabel Laten

Variabel Laten	Average Variance Extracted (AVE)
Government Performance	0.801
Partnering Agility	0.650
Transformation Capability	0.812

Sumber: Penulis (diolah)

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui pula bahwa nilai dari average variance extract bernilai di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dibangun dari masing-masing indikator dalam membentuk variabel laten dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dijelaskan dengan nilai dari AVE yang bernilai lebih dari 0,6. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi validitas.

Tabel 5. Construct Reliability and Validity

Variabel Laten	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Government Performance	0.875	0.923
Partnering Agility	0.490	0.785

Transformation Capability	0.769	0.897
---------------------------	-------	-------

Sumber: Penulis (diolah)

Begitu juga dengan nilai Composite Reliability pada output yang diberikan pada Tabel 5. merupakan indikator yang mengukur bahwa suatu variabel mempunyai sifat reliabel dengan penetapan standar nilainya yang lebih dari 0,7.

Tabel 6. Nilai R Square dan R Square Adjusted

Variabel Laten	R Square	R Square Adjusted
Government Performance	0.354	0.296
Partnering Agility	0.208	0.173

Sumber: Penulis (diolah)

Nilai dari R Square Adjusted dari Tabel 6 yang telah ditunjukkan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 0,296 memberikan makna bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan penjelasan terhadap government performance sebagai variabel terikat dan menjelaskan sebesar 29,6% dengan mengasumsikan ceteris paribus. Dengan kata lain bahwa semua konstruk eksogen secara serentak mempengaruhi Y (government performance) sebesar 29,6%. Sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel dan indikator lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian ini.

Dalam Tabel 7. di atas dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa secara simultan transformation capability memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap government performance dengan $\alpha = 5\%$.

Tabel 7. Nilai Koefisien Path dalam Penelitian (Efek Langsung dan Tidak Langsung)

Pengaruh Variabel	Stat	Std Dev	t – stat
Partnering Agility → Government Performance	0.138	0.274	0.503 (P Values 0.615)
Transformation Capability → Government Performance	0.520	0.225	2.312 (P Values 0.021)
Transformation Capability → Partnering Agility	0.456	0.147	3.095 (P Values 0.002)
Transformation Capability → Partnering Agility → Government Performance	0.063	0.162	0.3880 (P Values 0.698)

Sumber: Penulis (diolah)

Dengan meningkatnya transformation capability sebesar 1 (satu) satuan, maka akan berpeluang dalam meningkatkan government performance sebesar 52,0% secara langsung. Selain itu, transformation capability pun memiliki pengaruh secara langsung terhadap partnering agility dengan $\alpha = 5\%$. Dengan meningkatnya transformation capability sebesar 1 (satu) satuan, maka akan berpeluang dalam meningkatkan partnering agility sebesar 45,6% secara langsung. Pada kaitannya terhadap pengaruh tidak langsung terhadap government performance melalui partnering agility, transformation capability belum memiliki pengaruh tak langsung terhadap government performance.

Pada Tabel 8. Di bawah ini tertuang hasil empiris bagaimana indikator dari

masing-masing variabel laten secara signifikan dapat dijelaskan besar pengaruhnya dan bagaimana hubungannya. Pada variabel *partnering agility* (x1), seluruh indikator secara signifikan dapat menjelaskan indikator partnering agility. Dua indikator yang menjelaskan variabel partnering agility terbesar dan koefisiennya diantaranya adalah efektifitas komunikasi dan koordinasi antar departemen (0.769) dan pemda perlu untuk melakukan inovasi (0.437).

Tabel 8. Nilai Koefisien Path Penelitian Indikator

Indikator Variabel	Stat	Std Dev	t-stat
x11	0.769	0.175	4.399 (p-values 0.000)
x12	0.437	0.245	1.780 (p-values 0.076)
x21	0.561	0.075	7.440 (p-values 0.000)
x22	0.548	0.082	6.706 (p-values 0.000)
y11	0.433	0.088	4.950 (p-values 0.000)
y12	0.331	0.057	5.819 (p-values 0.000)
y13	0.354	0.079	4.505 (p-values 0.000)

Sumber: Penulis (diolah)

Pada variabel *transformation capability*, dua indikator yang dijelaskan pada tabel tersebut mulai dari yang terbesar diantaranya adalah penggunaan teknologi digital oleh Pemda (0.561) dan data sharing, kolaborasi, dan pengaturan ulang sumber daya (0.548). Sedangkan tiga indikator yang telah menjelaskan government performance diantaranya adalah transformasi digital dalam meningkatkan kepuasan Masyarakat (0.433),

transformasi digital dalam meningkatkan proses administrasi (0.331), dan transformasi digital dalam meningkatkan literasi digital (0.354).

IV. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari penelitian yang dilakukan mengenai keterkaitan antara *transformation capability* dan *partnering agility* memberikan pengaruh positif terhadap *government performance*. Dari hasil pengujian statistik secara empiris pada studi kasus di Prov. Maluku Utara dalam pelaksanaan digitalisasi di setiap perangkat daerah, secara langsung *transformation capability* memengaruhi *government performance*. *Transformation capability* dalam hal ini adalah penyediaan sarana dan prasarana dalam hal digital telah memberikan dampak yang positif terhadap *government performance*. *Transformation capability* dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik serta inovasi di dalamnya serta data sharing antar lembaga yang memberikan pengaruh positif terhadap *government performance*. *Transformation capability* secara langsung memengaruhi *partnering agility*, walau pada saat yang sama dalam penelitian ditunjukkan bahwa *partnering agility* belum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *government performance*.

Dalam diskusi lebih lanjut, perlu untuk ditelaah dan dianalisis lebih dalam dalam

penelitian selanjutnya mengapa *partnering agility* dalam penelitian dalam konteks transformasi digital di Prov. Maluku Utara belum memengaruhi secara langsung *government performance*. Selain itu pun hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh secara tak langsung *transformation capability* terhadap *government performance* yang dimediasi oleh *partnering agility*. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang menjadi menarik dalam penelitian selanjutnya dalam menganalisis *partnering agility* yang terjadi di Prov. Maluku Utara.

Dalam studi ini telah dipelajari secara mendalam bahwa pada kasus Prov. Maluku Utara, *partnering agility* belum sepenuhnya memberikan dampak pada *government performance*. *Partnering agility* merupakan isu yang sangat strategis untuk dibahas dalam setiap pemerintahan di Indonesia khususnya di Prov. Maluku Utara. Proses koordinasi, negosiasi, dan kerjasama yang dilakukan dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perlu untuk didorong di dalam pemerintahan dikarenakan kebijakan yang dibuat dan dijalankan akan sering bersinggungan dan memerlukan kontribusi dari setiap lembaga dan perangkat daerah khususnya untuk menciptakan setiap tujuan bersama sebagai produk setiap kebijakan itu. *Partnering agility* hingga saat ini di dalam birokrasi setiap pemerintahan merupakan hal yang cukup serius dikarenakan masing-

masing perangkat daerah atau lembaga masih bersifat ego sektoral dan mendahulukan kepentingan lembaganya. Sehingga terkait dengan *partnering agility*, perlu untuk dibuat suatu program bersama secara holistik agar dapat meningkatkan *partnering agility*. Hasil dari penelitian ini pun memberikan gagasan untuk penelitian selanjutnya untuk mencari tau dan menganalisis mengenai faktor apa saja yang dapat memengaruhi *partnering agility* itu tercapai.

V. REFERENSI

- Elsye, R. (2021). Kebijakan Pemerintah Bagi Perlindungan dan Keselamatan Masyarakat dari Penularan Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(2), 31–37. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1907>
- Filindra, A., Kaplan, N. J., & Buyuker, B. E. (2022). Beyond Performance: Racial Prejudice and Whites' Mistrust of Government. *Political Behavior*, 44(2), 961–979. <https://doi.org/10.1007/s11109-022-09774-6>
- Gao, Y., & Tang, Y. (2023). A Study on the Mechanism of Digital Technology's Impact on the Green Transformation of Enterprises: Based on the Theory of Planned Behavior Approach. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su151511854>
- Handayani, N., Risa Nurmayanti, D., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 32–40. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1564>
- Makhloufi, L., & Rosak-szyrocka, J. (2023). Understanding the Impact of Big Data Analytics and Knowledge Management on Green Innovation Practices and Organizational Performance: The Moderating Effect of Government Support. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15118456>
- Mart, P., De-pablos-heredero, C., & Montes, J. L. (2022). Impact of Dynamic Capabilities on Customer Satisfaction through Digital Transformation in the Automotive Sector. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14084772>
- Musabayana, G. T., Mutambara, E., & Ngwenya, T. (2022). An empirical assessment of how the government policies influenced the performance of the SMEs in Zimbabwe. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00192-2>
- Phuoc, N. Van. (2022). The Critical Factors Impacting Artificial Intelligence Applications Adoption in Vietnam: A Structural Equation Modeling Analysis. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies10060129>
- Putritamara, J. A., Hartono, B., Toiba, H., & Utami, H. N. (2023). Do Dynamic Capabilities and Digital Transformation Improve Business Resilience during the COVID-19 Pandemic? Insights from Beekeeping MSMEs in Indonesia. *Sustainability*.

- <https://doi.org/10.3390/su15031760>
- Shin, J., Mollah, A., & Choi, J. (2023). Sustainability and Organizational Performance in South Korea : The Effect of Digital Leadership on Digital Culture and Employees ' Digital Capabilities. *Sustainability*.
- <https://doi.org/10.3390/su15032027>
- Shinohara, S. (2023). Bad government performance and citizens ' perceptions : A quasi- experimental study of local fi scal crisis. *International Review of Administrative Sciences*.
<https://doi.org/10.1177/00208523211067085>
- Wu, Y., & Tham, J. (2023). The Impact of Executive Green Incentives and Top Management Team Characteristics on Corporate Value in China : The Mediating Role of Environment , Social and Government Performance. *Sustainability*, 1–23. <https://doi.org/10.3390/ su151612518>
- Wulandari, S., & Widowati, A. (2023). Implementasi Program Sipelandukilat dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman (Studi Kasus di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1), 11–24.
- Xiao, J., Zhang, H., & Han, L. (2023). How Digital Transformation Improve Government Performance : The Mediating Role of Partnering Agility. *IEEE Access*, 11(May), 59274–59285. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3284793>
- Zhang, Y., & Ayele, E. Y. (2022). Factors Affecting Small and Micro Enterprise Performance with the Mediating Effect of Government Support : Evidence from the Amhara Region Ethiopia. *Sustainability*, 14. <https://doi.org/10.3390/ su14116846>